



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2020**
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 merupakan perwujudan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Kementerian dan Lembaga Non Kementerian wajib melaporkan akuntabilitas kerjanya, oleh sebab itu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 sebagai alat penilaian kualitas kinerja yang diharapkan dapat mendorong etos kerja seluruh personil agar menjadi lebih baik pada tahun-tahun mendatang. Selain itu, laporan akuntabilitas ini juga diharapkan dapat mempercepat terwujudnya pemerintahan yang baik dan berfungsi sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik dalam melaksanakan pembangunan Kependudukan dan KB untuk mendukung pencapaian terwujudnya “Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera”.

Selanjutnya Kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas kami ucapkan terima kasih atas bimbingan dan pengarahannya dan juga kepada para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan semua pihak yang telah banyak menyumbangkan pemikiran dan masukan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas pada tahun mendatang.

Muara Beliti, Januari 2021
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN MUSI RAWAS,



Drs. SUPARDIYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19680205 199401 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Gambaran Umum OPD	2
Tentang Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	
Struktur Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	
I.3 Sumber Daya	7
I.4 Permasalahan yang dihadapi OPD Tahun 2019	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
II.1 Uraian Singkat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan	
Program Jangka Menengah (RENSTRA-OPD)	9
Visi dan Misi	
Tujuan dan Sasaran	
Strategi dan Kebijakan	
Program dan Kegiatan	
II.2 Uraian Rencana/Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
III.1 Capaian Kinerja Organisasi / OPD	16
III.2 Realisasi Anggaran	25
BAB IV. PENUTUP	
IV.1 Kesimpulan.....	27
IV.2 Langkah OPD Pada Masa Yang Akan Datang.....	27
LAMPIRAN	
(Pengukuran Kinerja Tahun 2020, Rencana dan Penetapan	
Kinerja Tahun 2021)	
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020	
Foto Kegiatan	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden. BKKBN bertugas melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015-2019, maka BKKBN menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2015-2019 dengan target kinerja dan kerangka pendanaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Implementasi akuntabilitas kinerja diwujudkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui penerapan sistem perencanaan dan penganggaran serta pengukuran kinerja yang menyeluruh pada setiap tingkat unit kerja.

Secara garis besar Pembangunan Kependudukan meliputi 5 (lima) aspek penting, yaitu :

1. Berkaitan dengan kuantitas penduduk, antara lain jumlah, struktur dan komposisi penduduk, laju pertumbuhan penduduk, serta persebaran penduduk.
2. Berkenaan dengan kualitas penduduk yang berkaitan dengan status kesehatan dan angka kematian, tingkat pendidikan, dan angka kemiskinan.
3. Mobilitas penduduk, seperti tingkat migrasi yang mempengaruhi persebaran penduduk antar wilayah, baik antar pulau maupun antara perkotaan dan pedesaan.
4. Penyediaan data dan informasi penduduk.
5. Penyerasian kebijakan kependudukan.

Aspek tersebut menjadi pendukung sasaran strategis yang hendak dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dalam pelaksanaannya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melakukan evaluasi dan

pengawasan pada setiap unit kerja dengan tujuan terciptanya kinerja yang akuntabel. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang merupakan salah satu lembaga daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Musi Rawas memiliki 3 (tiga) urusan pokok, yaitu :

1. Urusan Pengendalian Penduduk
2. Urusan Keluarga Berencana
3. Urusan Pembangunan Keluarga

Dalam pencapaian 3 (tiga) urusan pokok tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan KB
2. Meningkatnya Peserta KB Aktif
3. Menurunnya kebutuhan KB yang tidak terpenuhi
4. Menurunnya disparitas Total Fertility Rate
5. Pusat informasi konseling kesehatan reproduksi remaja
6. Meningkatnya jumlah keluarga yang mengikuti Bina Keluarga Balita
7. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk
8. Meningkatnya pemakaian alat kontrasepsi KB bagi peserta KB Aktif
9. Meningkatnya kesertaan ber-KB bagi Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
10. Meningkatnya jumlah keluarga yang mengikuti Bina Keluarga Remaja
11. Meningkatnya jumlah keluarga yang mengikuti Bina Keluarga Lansia
12. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 Tahun
13. Meningkatnya Penggunaan MKJP
14. Angka kelahiran pada remaja 15-19 tahun(ASFR)
15. Persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun)

BAB
I*Pendahuluan***I.1 LATAR BELAKANG**

Sesuai dengan arah pembangunan pemerintahan 2015-2019, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendukung pelaksanaan Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita), terutama pada Agenda Prioritas nomor 5 (lima) yaitu ” Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia” melalui Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana. Sejalan dengan arah pembangunan pemerintahan, dalam Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Musi Rawas yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas dalam melaksanakan Pembangunan Kependudukannya didukung oleh Misi 1 Kabupaten Musi Rawas, yaitu ”Memperbaiki Kualitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur” dengan arah kebijakan mengembangkan konsep keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkewajiban untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Implementasi akuntabilitas kinerja diwujudkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui penerapan sistem perencanaan dan penganggaran serta pengukuran kinerja yang menyeluruh pada setiap tingkat unit kerja.

Secara garis besar Pembangunan Kependudukan meliputi 5 (lima) aspek penting, yaitu :

1. Berkaitan dengan kuantitas penduduk, antara lain jumlah, struktur dan komposisi penduduk, laju pertumbuhan penduduk, serta persebaran penduduk.
2. Berkaitan dengan kualitas penduduk yang berkaitan dengan status kesehatan dan angka kematian, tingkat pendidikan, dan angka kemiskinan.

3. Mobilitas penduduk, seperti tingkat migrasi yang mempengaruhi persebaran penduduk antar wilayah, baik antar pulau maupun antara perkotaan dan pedesaan.
4. Penyediaan data dan informasi penduduk.
5. Penyerasian kebijakan kependudukan.

Aspek tersebut menjadi pendukung sasaran strategis yang hendak dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dalam pelaksanaannya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melakukan evaluasi dan pengawasan pada setiap unit kerja dengan tujuan terciptanya kinerja yang akuntabel. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang merupakan salah satu lembaga daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Musi Rawas memiliki 3 (tiga) urusan pokok, yaitu :

1. Urusan Pengendalian Penduduk
2. Urusan Keluarga Berencana
3. Urusan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dan tugas pembantuan yang di berikan Pemerintah Pusat.

I.2 GAMBARAN UMUM OPD

A. Tentang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sebagai implementasi dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan dan Pembangunan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas yang merupakan amandemen UU No. 10 tahun 1992 telah mengubah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan pertanggungjawaban langsung kepada Presiden. Dalam UU No. 52 tahun 2009 disebutkan, Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota harus membentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) sebagaimana OPD yang mengurus masalah kependudukan dan KB. Bagi program KB, Undang-Undang ini menjadi payung hukum yang kuat. Pemerintah pusat dan daerah secara tegas diwajibkan

meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan kontrasepsi kepada masyarakat.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas merupakan salah satu lembaga daerah yang berperan sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Nomenklatur Lembaga/Instansi KB dibuat tersendiri tanpa bergabung dengan instansi lainnya, yaitu dengan nama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2008) dan diperkuat dengan Peraturan Bupati Musi Rawas No. 49 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas.

B. Struktur Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas sesuai Peraturan Bupati Musi Rawas No. 49 tahun 2016 terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Masing - masing Bidang terdiri dari :
 - a. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan, membawahkan :
 1. Seksi Penyuluhan dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE);
 2. Seksi Advokasi dan Penggerakan; dan
 3. Seksi Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP).
 - b. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan :
 1. Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi;
 2. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana (KB); dan
 3. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana (KB).

- c. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahkan :
 1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 2. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia; dan
 3. Seksi Bina Ketahanan Remaja.
- d. Bidang Pengendalian Penduduk, membawahkan :
 1. Seksi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk;
 2. Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk; dan
 3. Seksi Data dan Informasi.

Kedudukan Dinas

Kedudukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai Peraturan Bupati Musi Rawas No. 49 tahun 2016 adalah :

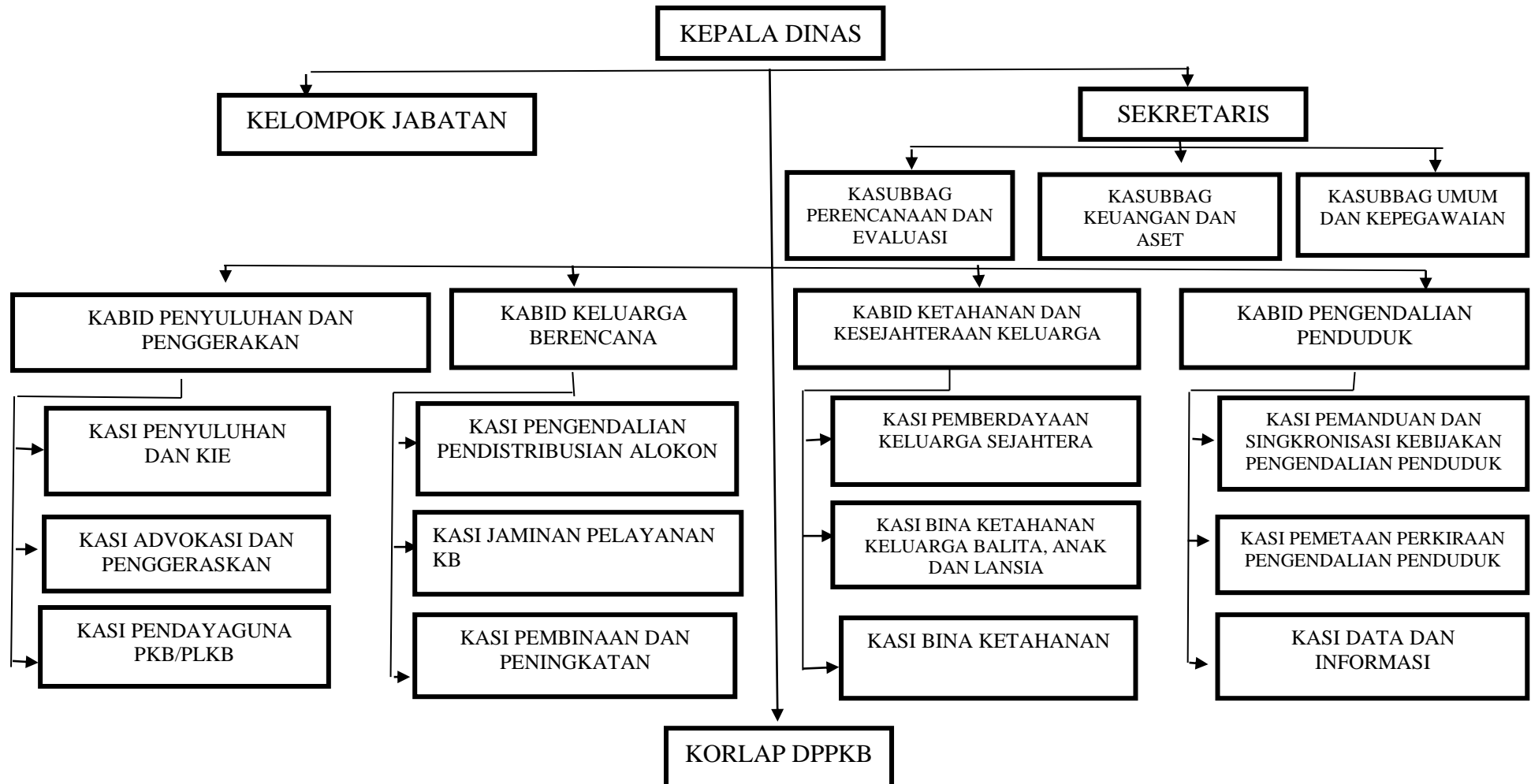
1. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
2. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
3. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan tugas perbantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan asas otonomi dan tugas tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
2. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
3. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
4. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;

5. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
6. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB)/Petugas Lapangan KB (PLKB) dan kader KB;
7. Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
8. Pelaksanaan pelayanan KB, pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber-KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Gambar I-1 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KABUPATEN MUSI RAWAS



I.3 SUMBER DAYA

A. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas per 31 Desember 2020 berjumlah 59 Orang yang dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan dapat dilihat pada tabel I.1 – I.2.

Tabel I-1. Jumlah Sumber Daya Manusia/Personalia Diklasifikasikan Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Esselon II	1
2.	Esselon III	5
3.	Esselon IV	13
5.	Staf	13
6.	Fungsional	27
Jumlah		59

B. SARANA PENUNJANG

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi, Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan dinas serta fasilitas perlengkapan lainnya. Bangunan gedung kantor terdiri dari 1 (satu) lantai seluas 363 M² yang terletak diatas tanah seluas 1.990 M² di Jalan Sulaiman Amin Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Agropolitan Center.

Inventaris dan peralatan kantor yang dimiliki terdiri dari meubeler, peralatan komputer serta peralatan kantor lainnya yang diperoleh dari pengadaan anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Dalam Tahun Anggaran 2020 terdapat pengadaan peralatan kantor yang terdiri dari :

Tabel I.2 Pengadaan Barang Peralatan dan Mesin Tahun 2020

No.	Jenis Barang	Jumlah (Bh/Unit)
1	Leptop	2 Unit
2	Printer	3 Unit
3	Lemari Kaca/ Rak Buku	1 Unit
4	Komputer PC	2 Unit

I.4 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI OPD TAHUN 2019

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) memiliki 2 (dua) Fungsi Utama sekaligus. *Pertama*, Laporan akuntabilitas merupakan sarana bagi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Presiden/Wakil Presiden dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur dan Kepala Perwakilan BPKP. *Kedua*, Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Rawas sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang. Dua fungsi utama Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tersebut merupakan cermin maksud dan tujuan penyusunan dan Penyampaian LKjIP oleh setiap instansi pemerintah. Dengan demikian maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas tahun 2019 adalah sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dengan meminimalisir permasalahan yang dihadapi tahun 2020 ini. Adapun permasalahan yang dihadapi tersebut, antara lain :

- a. Masih ada desa-desa wilayah kabupaten Musi Rawas yang sulit dijangkau berkaitan dengan sarana jalan maupun keamanan;
- b. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP);
- c. Belum optimalnya kegiatan penggerakan pendukung program KKBPK;
- d. Belum banyaknya penyuluhan-penyuluhan mengenai program KKBPK;
- e. Masih kurangnya pemahaman mengenai kelebihan KB MKJP;
- f. Masih rendahnya partisipasi pria dalam program Keluarga Berencana; dan
- g. Dalam penyediaan data dan informasi program kependudukan dan KB berbasis Tehnologi Informasi (TI) di Kecamatan atau Desa belum dapat dioptimalkan karena sarana kebutuhan untuk Tehnologi Informasi (TI) tersebut belum dapat terpenuhi secara maksimal.

BAB
II*Perencanaan Kinerja***II.1 URAIAN SINGKAT VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN, DAN PROGRAM JANGKA MENENGAH (RENSTRA-OPD).**

Rencana Strategis sebagaimana yang tertuang dalam Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Suatu Rencana Strategis setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas merupakan suatu perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap 5 (lima) tahun yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang merupakan perencanaan yang terarah, efektif dan berkesinambungan, sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan anggaran pembiayaan yang ada.

A. Visi dan Misi

Visi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas merupakan hasil akomodasi dari BKKBN Pusat yang disesuaikan dengan kondisi daerah dan telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 – 2021, yaitu :

“Meningkatnya Pelaksanaan KB untuk Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk”

Dalam upaya menuju visi tersebut, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas menjabarkannya kedalam Misi, sebagai berikut :

1. Meminimalkan kelahiran melalui peningkatan kesertaan ber-KB
 - ✓ Pravelensi peserta KB aktif (CPR)
 - Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Pravalence Rate/m CPR)
 - Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP
 - Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
 - Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kelompok kerja KKBPK yang efektif
 - Persentase pelayanan KB pasca persalinan
 - Persentase Unmetneed (Kebutuhan Ber-Kb yang tidak terpenuhi)
 - ✓ Angka Kelahiran Kasar (CBR)
 - Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-perdakan
 - Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun
 - Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15-19)
 - Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)
 - Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK

B. Tujuan dan Sasaran

Sedangkan sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas yaitu meningkatnya cakupan pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui KB dengan uraian seperti berikut

Tabel Tujuan – Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
1	Meningkatnya pelaksanaan KB untuk mengendalikan laju penduduk	1. Meminimalkan kelahiran melalui peningkatan kesertaan ber-KB	1. Pravelensi peserta KB Aktif (CPR) 2. Angka Kelahiran Kasar (CBR)

C. Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas menetapkan sejumlah Strategi dan Kebijakan yaitu :

No	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)
1	Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistic dan integratif	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguatan pemahaman 8 fungsi keluarga. b. Optimalisasi pola asuh dan pendampingan balita dan anak, serta pembentukan dan penguatan karakter sejak dini melalui keluarga. c. Peningkatan pola asuh dan pendampingan remaja, peningkatan kualitas dan karakter remaja, serta penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. d. Peningkatan kemandirian ekonomi keluarga, dengan sasaran khusus keluarga-keluarga akseptor KB lestari, keluarga peserta MKJP khususnya MOP dan MOW. e. Peningkatan kemitraan pembangunan keluarga.
2	Menguatnya pemanduan dan	<ul style="list-style-type: none"> f. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan

No	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)
3	sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk Meningkatnya akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR yang komprehensif	g. Peningkatan sinkronisasi dan pemanfaatan data/ informasi kependudukan h. Penguatan kapasitas faskes dan jaringan/ jejaring yang melayani KBKR i. Penguatan kemitraan kualitas pelayanan KBKR j. Peningkatan jangkauan pelayanan KBKR diwilayah dan sasaran khusus k. Peningkatan KB Pria
4	Meningkatkan Advokasi dan Penggerakan Program Bangsa Kencana	l. Peningkatan kinerja tenaga penyuluh KB/PLKB dan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan kader PPKBD/ Sub PPKBD

D. Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan. Program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas adalah :

Tabel Program – Kegiatan

1.	Program Pelayanan Administarsi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
		3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
		4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
		5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
		6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
		7. Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan
		8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

		9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		10. Penyediaan Makanan dan Minuman
		11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
		12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah
		13. Penyediaan Jasa pendukung Adminstrasi Teknis/Perkantoran
		14. Penyediaan Jasa Dokumentasi, Publikasi dan Dekorasi
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
		2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
		3. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
		4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ Operasional
		5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
		2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
4.	Program Peningkatan Pengembangan sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Kinerja Di Organisasi Perangkat Daerah
4.	Program Keluarga Berencana	1. Pelayanan KIE
		2. Pembinaan Keluarga Berencana
		3. Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling
		4. Pendataan Keluarga Peningkatan Kualitas Pencatatan dan Pelaporan Program KB
		5. Analisa dan evaluasi data hasil pencapaian program KB
		6. Penyelenggaraan Manajemen BOKB
5.	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	1. Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

6.	Program Pelayanan Kontrasepsi	1. Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB
		2. Penyelenggaraan Operasional Klinik KB
		3. Penanganan Kegagalan dan Komplikasi Kontrasepsi
7.	Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang Mandiri	1. Peningkatan Kinerja Petugas Lapangan dan IMP program KB
		2. Peringatan Hari Keluarga Nasional
		3. Gerakan Kampung KB
9.	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	1. Pengembangan Bina Keluarga

II.2 URAIAN RENCANA / PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Rencana/Perjanjian/Penetapan Kinerja merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah / unit kerja yang menerima amanah/ tanggung jawab/ kinerja dengan pihak yang memberikan amanah / tanggung jawab/ kinerja. Rencana/Perjanjian/Penetapan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas tahun 2020 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel II – 6
Rencana/Perjanjian/Penetapan Kinerja
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2020

Tujuan : Meningkatkan pelaksanaan KB untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program
1	2	3	4
Meminimalkan Kelahiran Melalui Peningkatan Kesehatan ber-KB	1. Prevalensi Peserta KB Aktif (CPR)	72,58	1. Program Pelayanan Kontrasepsi 2. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri 3. Program Keluarga Berencana 4. Program Kesehatan Reproduksi Remaja 5. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
	2. Angka Kelahiran Kasar (CBR)	20,0	

Tujuan yang ada pada setiap OPD : Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program
Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintah	Nilai SAKIP DPPKB	70,79	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	Indeks Profesionalisme ASN DPPKB	55	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

*Akuntabilitas Kinerja***III.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI / OPD**

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Rawas OPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran strategis berikut indikator kerjanya, namun demikian juga terdapat beberapa sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan pada tahun 2020 ini.

IKU yang ditetapkan untuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas telah digunakan sebagai indikator keberhasilan dan analisis pencapaian sasaran kinerja sebagaimana direncanakan dalam Penetapan Kinerja Tahun yang diuraikan dalam analisis capaian kinerja.

A. Uraian Perbandingan Capaian Antara Target dan Realisasi Tahun 2020

Pencapaian kinerja Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana kabupaten Musi Rawas untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Organisasi dan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

A.1. Tabel Perbandingan Capaian Target dan Realisasi Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	5	6
Meminimalkan kelahiran melalui peningkatan kesertaan ber-KB	Pravelensi peserta KB aktif (CPR)	72,58	77,34	106,56
	Angka Kelahiran Kasar (CBR)	20,0	19,06	104,93

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020

Meningkatkan Tata Kelola Administrasi Pemerintah	Nilai SAKIP DPPKB	70,79	71,81	101,44
	Indeks Profesionalisme ASN DPPKB	55,0	58,64	106,61

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	5	6
Program Keluarga Berencana	Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	79,98	77,34	96,70
	Cakupan pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 thn	1,82	1,03	176,70
Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Angka Kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR)	58	33	175,76
Program Pelayanan Kontrasepsi	Persentase kebutuhan ber-Kb yang tidak terpenuhi (Unmetneed)	12,08	12,04	100,33
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Cakupan PKB /PLKB yang didayagunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	96	100	104,17
Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	84	84,6	100,71
	Cakupan anggota Usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) ber-KB	86	85	98,84

**A.2. Tabel Perbandingan Pencapaian Kinerja Tahun Lalu dan beberapa tahun terakhir
dengan Capaian Kinerja Tahun 2020**

Sasaran Strategis	Indikator	Target			Realisasi			Capaian (%)		
		2020	2019	2018	2020	2019	2018	2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meminimalkan kelahiran melalui peningkatan kesertaan ber-KB	Pravelensi peserta KB aktif (CPR)	72,58	72,28	71,98	77,34	76,94	77,09	106,56	106,45	107,10
	Angka Kelahiran Kasar (CBR)	20,0	20,45	-	19,06	18,98	-	104,93	107,74	-

Program	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian (%)		
		2020	2019	2018	2020	2019	2018	2020	2019	2018
1	2	4	5	6	7	7	8	9		
Program Keluarga Berencana	Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	79,98	79,96	79,94	77,34	60,12	66,58	96,70	75,19	83,29
	Cakupan pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 thn)	1,82	1,83	1,84	1,03	2,33	1,07	176,70	78,54	171,96
Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Angka Kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR)	58	58,2	58,4	33	30,0	68,90	175,76	194	84,91
Program Pelayanan Kontrasepsi	Persentase kebutuhan ber-Kb yang tidak terpenuhi (Unmetneed)	12,08	12,18	12,28	12,04	12,11	12,92	100,33	100,58	95,05
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Cakupan PKB /PLKB yang didayagunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	96	94	92	100	82,91	81,41	104,17	88,20	88,49
Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	84	83	82	84,6	81,96	77,52	100,71	98,75	94,54

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020

	Cakupan anggota Usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) ber-KB	86	85	84	85	86,01	56,51	98,84	101,19	67,27
--	--	----	----	----	----	-------	-------	-------	--------	-------

A.3. Tabel Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2020 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target 2021	Capaian (%)
		2020				
1	2		3	4	5	6
Meminimalkan kelahiran melalui peningkatan kesertaan ber-KB	Pravelensi peserta KB aktif (CPR)	72,58	77,34	106,56	72,88	106,11
	Angka Kelahiran Kasar (CBR)	20,0	19,06	104,93	18,08	94,85

Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target 2021	Capaian (%)
		2020				
1	2		3	4	5	6
Program Keluarga Berencana	Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	79,98	77,34	96,70	80,00	96,67
	Cakupan pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 thn)	1,82	1,03	176,70	1,81	175,73
Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Angka Kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR)	58	33	175,76	57,8	175,15
Program Pelayanan Kontrasepsi	Persentase kebutuhan ber-Kb yang tidak terpenuhi (Unmetneed)	12,08	12,04	100,33	11,98	100,83

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Cakupan PKB /PLKB yang didayagunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	96	100	104,17	98	102,04
Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	84	84,6	100,71	85,0	99,53
	Cakupan anggota Usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) ber-KB	86	85	98,84	87	97,70

A.4. Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Standar Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kabupaten 2020			Nasional 2020		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	6	7	7	8	9	10
Meminimalkan kelahiran melalui peningkatan kesertaan ber-KB	Pravelensi peserta KB aktif (CPR)	72,58	77,34	106,56	61,78	74,06	104,42
	Angka Kelahiran Kasar (CBR)	18,50	19,06	97,06	17,5	-	91,81

Program	Indikator Kinerja	Kabupaten 2020			Nasional 2020		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	4	5	6	7		
Program Keluarga Berencana	Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	79,98	77,34	96,70	25,11	-	-
	Cakupan pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 thn)	1,82	1,03	176,70	-	-	-
Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Angka Kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR)	58	33	175,76	25	-	-

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020

Program Pelayanan Kontrasepsi	Persentase kebutuhan ber-Kb yang tidak terpenuhi (Unmetneed)	12,08	12,04	100,33	8,60	-	-
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Cakupan PKB /PLKB yang didayagunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	96	100	104,17	55,0	-	-
Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	84	84,6	100,71	-	-	-
	Cakupan anggota Usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) ber-KB	86	85	98,84	-	-	-

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa sebagian besar sasaran yang ditetapkan pada tahun 2020 terealisasi dengan baik. Hal ini didukung dengan semakin meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia, sarana dan pra sarana serta regulasi yang ada baik di tingkat Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, Provinsi, maupun Pemerintah Pusat.

A.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Capaian Kinerja Sasaran serta Alternatif Solusi yang dilakukan

Keberhasilan capaian kinerja sasaran seperti yang dijelaskan di atas antara lain didukung oleh :

- Tersedianya sarana dan prasarana untuk melaksanakan tugas yang cukup memadai;
- Kedudukan organisasi dan tugas pokok Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas yang cukup strategis sebagai pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mendukung sasaran strategis telah dilaksanakan dengan maksimal.

Namun demikian, ada beberapa indikator yang walaupun pencapaiannya sudah baik namun masih perlu ditingkatkan. Belum tercapainya target yang ditetapkan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

Kendala yang Dihadapi dalam pencapaian sasaran adalah :

1. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal pada program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur tidak dapat dilaksanakan dikarenakan pagu kegiatan tersebut di refocusing dampak pandemic COVID-19
2. Kurangnya Jumlah SDM yang kompeten di bidangnya;
3. Masih ada desa-desa wilayah kabupaten Musi Rawas yang sulit dijangkau berkaitan dengan sarana jalan maupun keamanan;
4. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP);
5. Masih rendahnya partisipasi pria dalam program Keluarga Berencana;
6. Masih banyaknya peserta KB Non MKJP;
7. Partisipasi stakeholder yang masih rendah;

Berdasarkan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran, maka diambil langkah-langkah antisipatif/ solusi sebagai berikut:

1. Adanya penambahan tenaga yang kompeten di bidangnya. Hal ini diperlukan dalam meningkatkan kualitas kinerja yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan yang telah ditargetkan atau yang hendak dicapai;
2. Melakukan pembinaan kepada Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) tentang program Keluarga Berencana. Hal ini dapat menjadi sebuah rantai yang tidak terputus antara OPD ke petugas lini lapangan serta kader yang akan memberikan komunikasi, informasi dan edukasi mengenai program KKBPK kepada seluruh lapisan masyarakat;
3. Meningkatkan sosialisasi KIE terutama tentang MKJP kepada masyarakat;
4. Memenuhi sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan sehingga pelaksanaan kerja dapat memenuhi kriteria waktu, mutu dan hasil sesuai dengan target kinerja;
5. Pengembangan SDM perencana dengan cara pendidikan dan pelatihan perencanaan. Hal ini dapat meningkatkan kualitas perencanaan sehingga dapat menghasilkan realisasi yang diinginkan sesuai dengan sasaran strategis yang hendak dicapai;
6. Peningkatan penggunaan fasilitas yang telah tersedia;
7. Menjalin koordinasi yang lebih baik dengan instansi terkait dilingkungan Pemkab Musi Rawas serta stakeholder lainnya yang menjadi target dalam kesepakatan mendukung program KKBPK;

A.6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya keuangan, adalah bahwa sumber daya keuangan belum cukup optimal dalam memenuhi atau mencakup seluruh kegiatan yang mendukung Program KB.
- Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya manusia (SDM), adalah bahwa sumber daya manusia belum cukup optimal dalam memenuhi atau mencakup petugas di lapangan dalam peningkatan mutu dan kualitas pelayanan KB yang prima.

A.7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Untuk analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja khususnya indikator kinerja utama adalah :

1. Capaian Prevalensi peserta KB Aktif (CPR) telah mencapai lebih dari 100% yaitu 106,56% pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas tahun 2020. Sasaran Strategis ini bertujuan agar OPD dapat meningkatkan peserta KB aktif. Pencapaian ini meningkat dari tahun lalu (106,45%). Meskipun target tercapai 106,45%, namun beberapa hal yang masih perlu diperhatikan adalah :

- a) Masih kurangnya pengetahuan mengenai Program KKBPK melalui Advokasi dan KIE menjadi peran yang cukup penting dalam membantu keputusan PUS untuk ber-KB;
- b) Hasil pencapaian Peserta KB aktif pada tahun 2020 adalah 60451 Akseptor (sumber : F/I/Pengendalian Lapangan tahun 2020) sementara hasil pencapaian peserta KB Baru pada tahun 2020 adalah 20,96% (sumber : F/II/Pelayanan Kontrasepsi tahun 2020). Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian peserta KB Baru lebih kecil dibandingkan Peserta KB Aktif, karena itu di tahun 2021, OPD menggalakkan kegiatan-kegiatan untuk mendukung peningkatan peserta KB Aktif.

Beberapa upaya ini telah dilakukan namun akan ditingkatkan kembali guna pencapaian yang lebih baik :

- a) Meningkatkan pembinaan kesertaan ber-KB melalui kelompok sasaran;
- b) Meningkatkan penggerakan Program KKBPK ke desa-desa;
- c) Adanya Pencanaan Kampung KB (pada desa tertinggal) di setiap kecamatan;

- d) Meningkatkan kualitas seluruh kegiatan yang berkaitan dengan indikator sehingga outcome bias optimal;
- e) Meningkatkan kesertaan ber-KB melalui pelayanan KB yang berkualitas dengan ikut serta dalam kegiatan MURA SEHAT SEMPURNA;
- f) Meningkatkan kesertaan ber-KB dari Non MKJP menjadi MKJP;
- g) Mensosialisasikan pembiayaan pelayanan KB melalui BPJS;
- h) Meningkatkan SDM baik petugas medis, petugas lapangan, pelaksana kegiatan melalui pelatihan-pelatihan;
- i) Meningkatkan sarana dan prasarana sebagai pendukung dalam melaksanakan kegiatan.

2. Capaian Angka Kelahiran Kasar/ Crude Birth Rate Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas tahun 2020 adalah 97,06% dari 100%. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak yang perlu dibenahi pada tahun 2021 berjalan ini terkait dengan urusan pengendalian penduduk melalui Keluarga Berencana. Beberapa yang menjadi kendala belum tercapainya target 100% adalah :

- a) Masih kurangnya informasi kepada rakyat tentang pentingnya menggunakan kontrasepsi KB
- b) Lokasi geografis beberapa desa di Kecamatan yang cukup jauh sehingga mengakibatkan petugas lapangan dan petugas medis kesulitan menjangkau desa-desa tersebut untuk melakukan kegiatan pelayanan dan sosialisasi.

Untuk itu, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana akan berupaya untuk menurunkan angka kelahiran kasar/ Crude Birth Rate (CBR) melalui:

- a) Meningkatkan kegiatan Advokasi dan KIE serta kegiatan bina keluarga guna peningkatan partisipasi penggunaan kontrasepsi pada Pasangan Usia Subur (PUS), Peningkatan partisipasi pria dalam program KKBPK, peningkatan pengetahuan wanita tentang KKBPK, peningkatan usia kawin pertama untuk memberikan edukasi terhadap pentingnya menggunakan KB, sehingga angka kelahiran kasar/ Crude Birth Rate (CBR) dapat menurun.
- b) Peningkatan Akses pelayanan KB di daerah yang sulit dijangkau melalui promosi Kampung KB. Kegiatan Kampung KB merupakan kegiatan lintas sektor sehingga melibatkan banyak OPD terkait, termasuk dalam membuka akses jalan menuju Kampung KB tersebut. Hal ini menguntungkan petugas medis dan petugas lapangan dalam melaksanakan tugasnya sehingga diharapkan melalui kegiatan ini terjadi

peningkatan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung terkait dengan sejalannya program KKBPK dengan sasaran strategis Kabupaten Musi Rawas.

III.2 REALISASI ANGGARAN

Laporan realisasi pelaksanaan rutin, pembangunan dan penerimaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas untuk Tahun Anggaran 2020 meliputi pokok-pokok sebagai berikut :

- a. Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung.
- b. Realisasi Anggaran Belanja Langsung.

Adapun rincian untuk masing-masing diuraikan di bawah ini :

A. Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung

Realisasi Anggaran Belanja tidak langsung (31 Desember 2020) pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas adalah sebesar Rp **3.564.059.446** ,- atau 89,97% dari dana yang tersedia dalam DPA sebesar Rp. **3.960.970.45,-**. Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung mengalami sisa anggaran sebesar Rp. 396.911.011,-.

B. Realisasi Anggaran Belanja Langsung

Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas untuk Tahun Anggaran 2020 (sampai dengan 31 Desember 2020) sebesar Rp. **6.382.615.213,-** atau 91,40% dari dana yang tersedia dalam DPA sebesar **Rp. 6.982.485.900,-** Lebih jelasnya tabel rincian berdasarkan program dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel Realisasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi		Sisa (Rp)
			(Rp)	%	
	1	2			5
1.	Program Pelayanan Administarsi Perkantoran	1.443.173.440	1.440.506.213	99,82	2.667.227
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	102.130.000	101.916.350	99,79	213.650
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	11.462.800	11.462.800	100	0
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	25.352.000	25.351.900	99,99	100
5.	Program Keluarga Berencana	2.807.311.000	2.300.892.100	81,96	506.418.900
6.	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	502.000	495.000	98,61	7.000
7.	Program Pelayanan Kontrasepsi	167.604.660	161.237.850	96,20	6.366.810

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020

8.	Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang Mandiri	2.421.250.000	2.337.023.000	96,82	84.227.000
9.	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	3.730.000	3.730.000	100	0
	Total	6.982.515.900	6.382.615.213	91,41	599.900.687

BAB
IV*Penutup***IV.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja sasaran dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas secara umum telah dilaksanakan mengacu pada RENSTRA 2016-2021 yang tertuang dalam RPJMD Pemkab Musi Rawas. Dari uraian laporan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Capaian kinerja sasaran tahun 2020 dengan nilai capaian tertinggi 176,70% dan terendah 96,70 %, angka tersebut menunjukkan ada peningkatan keberhasilan yang dicapai dari tahun sebelumnya. Persentase kehamilan yang tidak diinginkan mengalami penurunan pencapaian, hal ini dikarenakan masih tingginya tingginya PUSMUPAR (PUS Muda Varietas Rendah);
2. Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. **3.564.059.446,-** serta Belanja Langsung sebesar **6.382.615.213- .**

IV.2 LANGKAH OPD PADA MASA YANG AKAN DATANG

Berdasarkan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran, maka strategi pemecahan masalah atau langkah yang dilakukan antara lain :

- a. Meningkatkan sarana dan prasarana petugas lapangan dalam menjangkau calon peserta KB yang tidak terlayani;
- b. Memaksimalkan kegiatan Gerakan Kampung KB yang merupakan kegiatan yang dilakukan bersama-sama lintas sektor dalam mendukung MURA Sempurna 2021;
- c. Meningkatkan kegiatan penggerakan, khususnya pada kelompok kegiatan;
- d. Meningkatkan koordinasi dan pembinaan terhadap kinerja pegawai melalui media rapat staf serta meningkatkan pengawasan dan pembinaan kepada staf sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- e. Memenuhi sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan sehingga pelaksanaan kerja dapat memenuhi kriteria waktu, mutu dan hasil sesuai dengan target kinerja;

- f. Pengembangan SDM perencana dengan cara pendidikan dan pelatihan perencanaan sehingga SDM dapat kompeten dan bertanggungjawab terhadap tugas pokok dan fungsinya;
- g. Meningkatkan disiplin pegawai staf Badan KB Kabupaten Musi Rawas sesuai manajemen personalia;
- h. Menjalinkan koordinasi yang lebih baik dengan instansi terkait dilingkungan Pemkab Musi Rawas
- i. Menata budaya kerja yang kondusif dengan menciptakan suasana kerja yang nyaman dan tentram.



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Sulaiman Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Muara Beliti 31661
Telepon/Fax (0733) 4540123 – Website: www.bkb.musirawaskab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. SUPARDIYONO**
Jabatan : **KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MUSI RAWAS**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **H.HENDRA GUNAWAN**
Jabatan : **BUPATI MUSI RAWAS**

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Beliti, 23 Januari 2020

PIHAK KEDUA



H. HENDRA GUNAWAN

PIHAK PERTAMA

()

Drs. SUPARDIYONO
Pembina Tingkat Satu
NIP.19680205 199401 1 001

**PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun Anggaran : 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meminimalkan Kelahiran Melalui Peningkatan Kesertaan ber-KB	Prevelensi peserta KB Aktif (CPR)	Persen	72,58
		Angka Kelahiran Kasar (CBR)	Konstanta	20
2	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintah	Nilai SAKIP DPPKB	indeks	70,79
		Indeks Profesionalisme ASN DPPKB	Persen	55,0

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1,742,345,500	APBD
2 Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 223,746,000	APBD
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 73,224,500	APBD
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Rp 29,000,000	APBD
5 Program Keluarga Berencana	Rp 219,481,000	APBD
6 Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Rp 79,615,000	APBD
7 Program Pelayanan Kontrasepsi	Rp 237,979,000	APBD
8 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Rp 274,408,500	APBD
9 Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Rp 44,045,500	APBD
Total Anggaran	Rp 2,923,845,000	

Muara Beliti, 23 Januari 2020
 PIHAK PERTAMA
 KEPALA DINAS
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
 KELUARGA BERENCANA

Drs. SUPARDIYONO
 Pembina Tingkat Satu
 NIP.19680205 199401 1 001

PIHAK KEDUA
 BUPATI MUSIRAWAS

